

**Dimamika Partisipasi Publik Dalam Demokrasi Digital: Studi Kasus Gerakan
#KejayanMemanggil Tahun 2019**

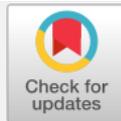
Nailah Alifah Mujahidah¹, Raisha Maulidza², Najwa Sabilla³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Raya,
Pd. Labu, Kota Depok, 12450

E-mail: 2210413163@mahasiswa.upnvj.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Dikirim: 18 Januari 2024;
Diterima: 22 Februari 2024;
Dipublikasi: 28 Februari 2024;



*Copyright © 2024. Owned by
Author(s), published by JSC*

*This is an open-access article.
License: Attribution-
NonCommercial-ShareAlike (CC BY-
NC-SA)*

How to cite:

**Mujahidah, N.A., Raisha
Maulidza, R, Sabilla, N. 2024.
Dimamika Partisipasi Publik
Dalam Demokrasi Digital:
Studi Kasus Gerakan
#KejayanMemanggil Tahun
2019.**

*Journal of Social Contemplativa. 2(1);
58-77.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi demokrasi digital melalui studi kasus Gerakan #KejayanMemanggil di tahun 2019. Gerakan Kejayan awalnya dicetuskan pada tahun 1998 yang digunakan sebagai bentuk gerakan pada era reformasi. Tetapi kini, gerakan tersebut muncul kembali pada tahun 2019 yang diawali oleh mahasiswa wilayah Yogyakarta untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait kebijakan pemerintah. Lalu aksi yang dilakukan oleh mahasiswa wilayah Yogyakarta menjadi sorotan di media sosial, maka hadirilah #kejayanmemanggil sebagai bentuk dukungan masyarakat Indonesia yang berpartisipasi menyuarakan melalui media sosial, sehingga #geyanmemanggil menjadi trending topik di media sosial Twitter pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dari sumber-sumber internet seperti artikel ilmiah, jurnal, dan buku-buku yang relevan dan terakreditasi. Penelitian ini menyoroti peran media sosial dalam membentuk opini publik dan memobilisasi partisipasi. Fokus pada generasi milenial dan Z yang aktif menggunakan platform digital untuk menyuarakan aspirasi dan membangun kesadaran bersama. Respons pemerintah yang transparan dan keterbukaan informasi diidentifikasi sebagai kunci untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik dalam era demokrasi digital.

Abstract. *This research explores digital democracy through a case study of the #KejayanMemanggil Movement in 2019. The Kejayan Movement was originally initiated in 1998 as a form of movement during the reformation era. But now, the movement reappeared in 2019, which was initiated by Yogyakarta area students to voice their aspirations regarding government policies. Then the action carried out by Yogyakarta area students became a highlight on social media, so #kejayanmemanggil was present as a form of support from the Indonesian people who participated in voicing through social media, so that #geyanmemanggil became a trending topic on Twitter social media in 2019. This research uses a qualitative analysis method, from internet sources such as scientific articles, journals, and relevant and accredited books. This research highlights the role of social media in shaping public opinion and mobilizing participation. It focuses on millennials and Z generations who actively use digital platforms to voice their aspirations and build collective awareness. Transparent government responses and*



information disclosure are identified as key to maintaining stability and increasing public trust in an era of digital democracy.

Kata Kunci: Digital, Gerakan, Partisipasi, Gejayan, Media

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang, demokrasi tidak hanya menjadi sebuah sistem politik, tetapi juga sebuah proses yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Peran teknologi informasi dan media sosial dalam membentuk wajah demokrasi telah menciptakan transformasi besar-besaran dalam cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan menyuarakan pendapat mereka. Demokrasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam dinamika partisipasi publik, menawarkan platform yang memungkinkan warga untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan menyuarakan aspirasi mereka melalui medium digital. Fenomena ini menciptakan suatu paradigma baru di mana keterlibatan masyarakat tidak lagi terbatas pada ruang fisik tetapi juga meluas ke dunia maya. Dalam konteks ini, dinamika partisipasi publik mengalami transformasi yang signifikan, menciptakan tantangan dan peluang baru. P

erkembang teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan media sosial, telah menjadi katalisator utama dalam mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan lembaga-lembaga demokratis. Partisipasi publik yang sebelumnya terbatas oleh kendala geografis dan logistik, kini dapat dilakukan secara instan dan global melalui platform-platform digital. Namun, sementara demokrasi digital membuka pintu bagi partisipasi yang lebih inklusif, juga muncul berbagai isu terkait privasi, keamanan digital, dan ketidaksetaraan akses. Dalam konteks ini, penting untuk menyelidiki dinamika partisipasi publik dalam demokrasi digital, mengidentifikasi tren, hambatan, dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan demokratis.

Salah satu fenomena menarik yang mencerminkan dinamika partisipasi publik dalam demokrasi digital adalah munculnya gerakan sosial online, yang tidak hanya mencerminkan protes atau aspirasi masyarakat, tetapi juga menciptakan platform inklusif untuk berbagai suara. Gerakan sosial baru dianggap sebagai bentuk aktivisme yang muncul dalam konteks perubahan ekonomi politik yang didominasi oleh

ideologi dan praktik neoliberalisme (Suharko, 2006). Selain itu, ciri khas gerakan sosial baru adalah penekanan pada kebebasan di dalamnya, seperti tidak adanya struktur organisasi yang terlalu terbirokratisasi, tetapi tetap memiliki tujuan atau isu perjuangan bersama (Purboningsih, 2015). Perbedaan utama gerakan sosial baru terletak pada istilah yang berbeda yang digunakan untuk menggambarkan tindakan kolektif, dibandingkan dengan gerakan sosial tradisional (Sari & Siahainenia, 2015). Peristiwa demonstrasi pada tanggal 23 dan 30 September 2019 mencerminkan klimaks dari terhambatnya saluran partisipasi masyarakat terhadap Pemerintah dan DPR RI, terutama terkait isu legislasi. Terdapat setidaknya dua pandangan yang berlawanan, di mana RUU KPK yang kemudian menjadi UU KPK dianggap tidak menimbulkan masalah dari perspektif pembuat kebijakan, namun ternyata menimbulkan kontroversi di kalangan publik. Keputusan pengesahan dianggap kurang melibatkan sosialisasi yang menyeluruh, menciptakan persepsi bahwa pemerintah tidak cukup terbuka terhadap partisipasi publik. Serangkaian demonstrasi juga mengindikasikan adanya masalah dalam hubungan antara masyarakat dan DPR RI serta pemerintah, yang telah terbentuk jauh sebelum demonstrasi terjadi. Ketidaknyamanan koneksi ini dapat diukur dari rendahnya intensitas komunikasi, kurangnya transparansi informasi dan pendapat, serta keterbatasan partisipasi dalam berbagai bentuk lainnya.

Gerakan #KejayanMemanggil yang mencuat pada tahun 2019 di sekitar kawasan Gejayan, Yogyakarta. Gerakan ini bukan hanya sekadar ungkapan protes atau keluhan, melainkan sebuah demonstrasi kekuatan partisipasi publik dalam era digital. Dengan menggunakan berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan WhatsApp, gerakan ini berhasil menyatukan suara individu-individu yang mungkin sebelumnya terfragmentasi, membentuk opini publik, dan menghasilkan

dampak konkret. Peristiwa demonstrasi pada tanggal 23 dan 30 September 2019 mencerminkan klimaks dari terhambatnya saluran partisipasi masyarakat terhadap Pemerintah dan DPR RI, terutama terkait isu legislasi. Terdapat setidaknya dua pandangan yang berlawanan, di mana RUU KPK yang kemudian menjadi UU KPK dianggap tidak menimbulkan masalah dari perspektif pembuat kebijakan, namun ternyata menimbulkan kontroversi di kalangan publik. Keputusan pengesahan

dianggap kurang melibatkan sosialisasi yang menyeluruh, menciptakan persepsi bahwa pemerintah tidak cukup terbuka terhadap partisipasi publik. Serangkaian demonstrasi juga mengindikasikan adanya masalah dalam hubungan antara masyarakat dan DPR RI serta pemerintah, yang telah terbentuk jauh sebelum demonstrasi terjadi. Ketidaknyamanan koneksi ini dapat diukur dari rendahnya intensitas komunikasi, kurangnya transparansi informasi dan pendapat, serta keterbatasan partisipasi dalam berbagai bentuk lainnya. Partisipasi publik dalam demokrasi digital, seperti yang dicontohkan oleh gerakan ini, melibatkan lebih dari sekadar pengekspresian pendapat. Ia membuka ruang bagi pembentukan komunitas daring, dimana ide-ide dan aspirasi bersatu untuk menciptakan dorongan perubahan. Studi ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap cara gerakan #KejayanMemanggil menggerakkan partisipasi publik, mekanisme yang digunakan untuk menyebarkan informasi, serta tantangan dan dampak dari dinamika demokrasi digital tersebut.

2. KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Teori Kebebasan Berpendapat

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) yang berisi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar”. sehingga, kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat atau dalam sistem pemerintahannya rakyat mengambil andil yang besar. Kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat entah individu maupun kelompok lainnya. kebebasan berpendapat merupakan kunci dari kebebasan berbicara yang diakui dalam deklarasi hak asasi manusia yang diakui oleh banyak negara.

Dalam "*On Liberty*" (1859), John Stuart Mill mengemukakan bahwa membungkam ekspresi pendapat adalah merampok umat manusia dari pertukaran ide yang kaya. Baginya, nilai sejati kebebasan berpendapat terletak pada pertentangan ide, yang bisa membawa perubahan dari kesalahan ke kebenaran. Mill menegaskan bahwa

seseorang yang hanya tahu satu sisi dari suatu kasus memiliki pemahaman yang terbatas. Dia juga memperingatkan tentang bahaya "tirani mayoritas," menekankan bahwa nilai sebuah negara tergantung pada nilai individu-individu di dalamnya. Oleh karena itu, Mill menyuarakan kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental, mencakup perlindungan terhadap ekspresi pandangan bahkan jika tidak populer.

2.2 Teori Gerakan Sosial

Gerakan sosial memainkan peran krusial dalam mendorong pembentukan sistem politik demokratis. Contohnya, demokratisasi di Polandia dipacu oleh gerakan buruh yang meluas, sementara tumbangnya rezim komunis dan runtuhnya Uni Soviet juga dipengaruhi oleh gerakan sosial. Di Filipina, gerakan *people power* berhasil menjatuhkan rezim otoriter Ferdinand Marcos yang telah berkuasa puluhan tahun. Bahkan di dalam negeri, kejatuhan rezim Soeharto setelah lebih dari 30 tahun berkuasa, diikuti oleh reformasi politik, tak terlepas dari peran kuat gerakan sosial. Contoh-contoh lain menunjukkan seberapa besar pengaruh gerakan sosial, termasuk dalam perubahan kebijakan politik.

Selain itu, gerakan sosial juga berperan sebagai solusi dalam kebuntuan hubungan antara masyarakat sipil dan negara, terutama dalam mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh aktor negara. Hubungan yang dibangun berdasarkan dialogis masyarakat beradab, terutama pada masyarakat yang sudah mapan dalam menjalankan demokrasi liberal, seringkali menghadapi kebuntuan. Situasi tersebut bahkan lebih kompleks di masyarakat yang baru membangun sistem demokratis, terutama ketika aktor politik dalam negara bersekongkol dengan pemimpin-pemimpin masyarakat sipil untuk memanipulasi kesadaran komunitas. Bagi pendukung atau pihak yang terlibat dalam gerakan sosial, gerakan ini dianggap sebagai upaya yang positif. Salah satu ciri khas yang membedakan gerakan sosial dari bentuk penyimpangan lainnya adalah adanya kesepakatan.

Menurut Anthony Giddens, yang mendefinisikan gerakan sosial sebagai kelompok orang yang berusaha mencari solusi atau menghambat suatu proses perubahan sosial, gerakan sosial biasanya muncul segera setelah terjadi keresahan sosial. Dalam analisis teori gerakan sosial, Anthony Giddens menekankan bahwa

gerakan sosial merupakan usaha kolektif dari pihak-pihak dengan kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar kerangka lembaga yang sudah mapan. Gerakan sosial, menurut Anthony Giddens sebagaimana didefinisikan oleh Fadhillah (2006), merujuk pada upaya kolektif untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama melalui tindakan kolektif, yang berlangsung tanpa intervensi dari lembaga-lembaga yang mapan. Definisi ini lebih rinci diterangkan oleh Kaih (2002), yang menjelaskan bahwa gerakan sosial merupakan kelompok informal yang terorganisir dengan maksud mencapai tujuan sosial tertentu, terutama dalam konteks mengubah struktur dan nilai sosial.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Mayer dan Tarrow (1998), yang mendefinisikan gerakan sosial sebagai bentuk politik perlawanan yang dilakukan oleh rakyat biasa yang bergabung dengan kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh lebih besar. Mirsel (2004), dalam karyanya berjudul "Teori Pergerakan Sosial", menggambarkan gerakan sosial sebagai kumpulan keyakinan dan tindakan tak terlembaga yang dijalankan oleh sekelompok orang dengan tujuan memajukan atau menghalangi perubahan dalam masyarakat. Lebih lanjut, Mayer dan Tarrow (1998) dalam karya "Social Movement Society" mengartikan gerakan sosial secara inklusif, sebagai tantangan bersama yang berakar pada tujuan dan solidaritas bersama. Tantangan tersebut berlangsung dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elit, saingan atau musuh, serta pemegang otoritas. Definisi ini mencerminkan dinamika kompleks gerakan sosial yang melibatkan interaksi dengan berbagai pihak dalam masyarakat.

3. KAJIAN LITERATUR

Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik aktivisme di media sosial melalui gerakan yang terdapat di Yogyakarta yaitu #kejayanmemanggil pada tahun 2019. Gerakan tersebut memanfaatkan hashtag sebagai media komunikasi yang mereka gunakan untuk menyebarkan informasi-informasi dan memberikan pendapat mengenai gerakan tersebut. Hal tersebut rupanya menghasilkan partisipasi politik yang besar dari masyarakat sipil dan memunculkan kesadaran mengenai permasalahan yang terjadi pada tahun 2019 itu. Pada aktivitas yang dilakukan oleh masa aksi

#kejayanmemanggil selaras dengan fenomena masyarakat jaringan dengan hadirnya kelompok yang berasal dari suatu individu-individu yang bertemu pada akses jaringan media sosial yang dilihat lebih dari 50% masyarakat bahkan yang aksi massa #KejayanMemanggil, sehingga hal tersebut mempermudah untuk membentuk sebuah formasi kelompok sosial berupa aliansi berjejaring digital. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang fokus pada penggalian berbagai daya seperti nuku dan jurnal terkait aktivisme media sosial #KejayanMemanggil (Hasna, 2022)

Tindakan kolektif dalam aksi #KejayanMemanggil dapat dipahami sebagai bagian integral dari gerakan sosial baru yang mengadopsi paradigma mobilisasi sumberdaya (resource mobilization). Konsep ini mencerminkan upaya mobilisasi kolektif dalam menggalang massa aksi dengan lebih efektif. Aksi ini terhubung erat dengan aktivisme sosial media, di mana massa aksi menggunakan tagar #KejayanMemanggil sebagai sarana untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan memperoleh informasi melalui jaringan media sosial.

Aktivitas tersebut melibatkan kreativitas dalam menyusun strategi untuk menghubungkan protes dan mempercepat mobilisasi protes secara lebih luas. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mobilisasi ini termasuk kemudahan, kecepatan, dan banyaknya tweet yang menggunakan tagar #KejayanMemanggil. Hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa unsur, seperti light package (paket informasi yang sederhana dan mudah dicerna), headline appetite (daya tarik judul yang kuat), dan trailer vision (visi yang diperlihatkan secara singkat seperti cuplikan trailer), sehingga netizen lebih mudah tergerak dan terlibat dalam aksi tersebut. Bahasa yang digunakan pun bersifat ringan dan sesuai dengan bahasa sehari-hari, memudahkan pembacaan dan pemahaman pesan. Dengan demikian, keseluruhan dinamika ini berkontribusi pada pembentukan opini publik terkait aksi #KejayanMemanggil, menunjukkan bahwa aksi tersebut tidak hanya merupakan tindakan spontan, tetapi juga hasil dari strategi mobilisasi yang cerdas dan terencana.

Untuk mengetahui kekuatan sosial media dalam aksi protes juga berisi tentang posisi dan perkembangan media sosial di Indonesia, khususnya dalam hubungannya

dengan aktivisme. Pergeseran dari media tradisional ke media digital, seperti media sosial dan platform berita online, terlihat jelas. Mahasiswa dan generasi muda Indonesia juga terlibat dalam aktivisme sosial melalui media sosial, ditunjukkan keterlibatan warga dalam jaringan gerakan sosial. #KejayanMemanggil pada September 2019 di Yogyakarta menjadi sorotan. Penggunaan media sosial, terutama Twitter, memainkan peran kunci dalam memobilisasi ribuan orang untuk turun ke jalan dengan tuntutan yang mencakup penundaan dan revisi beberapa undang-undang yang dianggap bermasalah. Selain itu, penelitian mencatat bahwa penggunaan media sosial tidak hanya untuk aktivitas konsumtif dan hiburan, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan sipil dalam jaringan gerakan sosial. Namun, terdapat catatan bahwa tidak semua aktivisme media sosial berhasil mencapai tujuan gerakan. Pentingnya media sosial juga terlihat dalam pendanaan aksi protes, seperti yang terjadi dalam gerakan #KejayanMemanggil yang berhasil mengumpulkan dana melalui platform crowdfunding digital. Hasil penelitian ini menyoroti peran penting media sosial dalam memfasilitasi mobilisasi, koordinasi gerakan offline, dan mendukung aktivisme sipil di Indonesia (Fuadi, ...)

Interaksi simbolik Herbert Mead yang digunakan oleh perempuan Muslim dalam 'Aksi Kejayan Memanggil'. Tujuan utama adalah untuk memahami bagaimana komunikasi simbolik perempuan Muslim memengaruhi persepsi pemerintah terhadap tuntutan mereka terkait revisi undang-undang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak positif aksi tersebut sebagai wujud eksistensi perempuan dalam pembelaan hak dan kewajiban mereka.

Dalam penelitian tersebut Siti Nur Alfia Abdullah selaku penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk memungkinkan peneliti mendalami memahami interaksi simbolik perempuan Muslim dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam 'Aksi Kejayan Memanggil'. Data dikumpulkan melalui analisis media sosial yang terkait dengan aksi tersebut dan beberapa buku terkait. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan (Alfia Abdullah,)

peneliti untuk mengeksplorasi konteks dan makna di balik tindakan simbolik perempuan Muslim. Dalam penelitiannya mencakup analisis mendalam

terhadap interaksi simbolik perempuan Muslim, fokus pada bagaimana simbol-simbol tersebut digunakan untuk menyuarakan pendapat dan tuntutan mereka terhadap revisi undang-undang. Data dari media sosial dan buku-buku terkait digunakan untuk membentuk pemahaman holistik tentang peran komunikasi simbolik dalam 'Aksi Gejayan Memanggil'. Penelitian juga membahas dampak positif dari aksi tersebut, menunjukkan bahwa perempuan Muslim terlibat dalam pembelaan hak dan kewajiban mereka melalui interaksi simbolik, dan menguatkan eksistensi mereka dalam arena aktivisme.

Perbedaan mendasar antara penelitian kami dengan kajian sebelumnya terletak pada inklusivitasnya, di mana penelitian ini tidak terbatas hanya pada satu kelompok gender atau agama tertentu. Sebaliknya, penelitian ini akan melibatkan serta mencakup seluruh spektrum gender dan berbagai kelompok agama yang turut serta aktif dalam gerakan 'Gejayan Memanggil'. Dalam kerangka ini, penelitian kami bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai perspektif, pengalaman, dan pandangan yang muncul dari partisipasi kolektif ini.

Selanjutnya, penelitian ini akan merinci dan mengaitkan dinamika gerakan tersebut dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam konteks media digital. Penggunaan media online sebagai saluran penyampaian aksi dan aspirasi akan diungkap lebih lanjut, memperkaya pemahaman tentang bagaimana media digital menjadi wadah efektif untuk menyuarakan tuntutan dalam aksi kolaboratif ini. Melalui pendekatan ini, penelitian kami bertujuan untuk menggambarkan peran dan dampak media digital dalam membentuk narasi dan memperkuat pesan aksi yang disampaikan oleh para peserta gerakan 'Gejayan Memanggil'.

4. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh (Moleong, 2017), penelitian kualitatif mencakup upaya memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh. Pendekatan ini dilakukan melalui deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa, terutama dalam konteks alamiah, dan menggunakan berbagai metode alamiah. Sementara itu, (Hendryadi, et.

al, 2019) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu proses penyelidikan naturalistik yang bertujuan mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang akan diteliti. Studi pustaka dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber-sumber yang terakreditasi, seperti website jurnal, artikel ilmiah, dan buku relevan sesuai dengan tema penelitian. Materi dari sumber-sumber tersebut akan dikembangkan dan dianalisis lebih mendalam untuk menjelajahi topik penelitian secara komprehensif.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Gerakan Kejayan 2019 dan Peran Media Sosial dalam Gerakan #Kejayanmemanggil

Kejayan Memanggil berakar pada Era Reformasi 1998 saat Jalan Gejayan menjadi saksi sejarah keberanian mahasiswa Yogyakarta menentang rezim Soeharto. Demonstrasi pada 8 Mei 1998 menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap krisis ekonomi, menolak kembali Soeharto sebagai presiden, protes terhadap kenaikan harga, dan desakan untuk reformasi. Gerakan ini kembali muncul pada 2019 sebagai Kejayan Memanggil, diinisiasi oleh mahasiswa Yogyakarta yang mendorong seruan damai untuk kesejahteraan dan kebebasan yang dirasa semakin terbatas. Aksi dimulai di media sosial, mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan, mencerminkan ketidakpuasan terhadap institusi sosial dan politik di tengah perubahan masyarakat. Perspektif ini menekankan konstruksi identitas dan politisasi sebagai perekat bagi para peserta dalam Gerakan Kejayan Memanggil (Nofrima & Qodir, 2021).

Melalui laporan detik.com, Pada tahun 2019 di Yogyakarta, suara mahasiswa berkumandang melalui aksi Kejayan Memanggil, membawa risalah perubahan untuk Indonesia. Dengan berani, mereka menuntut penundaan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP, merayakan semangat pemberantasan korupsi melalui revisi UU KPK, dan memohon negara untuk mengadili pelaku kerusakan lingkungan yang telah merugikan beberapa wilayah di Indonesia. Dalam semangat solidaritas, para mahasiswa menolak pasal-pasal yang tidak berpihak pada

pekerja dalam RUU Ketenagakerjaan serta meresapi kekhawatiran terhadap RUU Pertanahan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria. Tidak hanya itu, mereka dengan tegas mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, sambil mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperkuat proses demokratisasi di Indonesia dan mengakhiri penangkapan aktivis yang terus terjadi di berbagai sektor. Aksi ini menjadi punggungan perubahan, di mana mahasiswa menjadi penjaga nilai-nilai keadilan dan demokrasi (Devi, 2019).

Di era digital yang terus berkembang, masyarakat kini semakin aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan digital. Aktivitas ini terutama terlihat dalam keterlibatan intensif pada platform digital, yang menawarkan beragam kemungkinan personalisasi (Bennett, 2012). Personalisasi ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari komunikasi hingga mencari hiburan dan informasi, yang sesuai dengan keterampilan dan kebutuhan masyarakat. Era digital saat ini memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi dan komunikasi, memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi, berpendapat, dan mengkritik kebijakan pemerintah melalui jaringan digital. Fenomena ini sangat berkaitan dengan konsep masyarakat jaringan yang diperkenalkan oleh (Van Dijk, 2006).

Masyarakat jaringan ini adalah formasi sosial yang melibatkan kelompok, organisasi, dan komunitas massa yang terhubung secara kolektif. Hal ini mencerminkan organisasi dari berbagai aspek, mulai dari individu hingga kelompok sosial. Dengan kata lain, masyarakat jaringan menekankan hubungan yang luas secara kolektivitas. Partisipasi dalam aksi #KejayanMemanggil mencerminkan dinamika masyarakat jaringan. Aksi ini melibatkan kelompok individu yang bertemu melalui media digital, membentuk aliansi berjejaring untuk memperjuangkan tuntutan bersama. Data penggunaan internet di Indonesia, terutama di Yogyakarta, menunjukkan bahwa masyarakat sangat aktif dalam berjejaring digital. Tingginya penggunaan media sosial, seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, mencerminkan peran penting platform tersebut dalam menyuarakan aspirasi dan memobilisasi massa. Aktivisme media sosial dalam aksi #KejayanMemanggil mengeksplorasi kekuatan media sosial untuk mengorganisir, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi.

Dalam hal ini, media sosial menjadi saluran efektif untuk mempercepat mobilisasi protes terhadap isu-isu sosial dan politik di Indonesia. Namun, tantangan muncul terkait perubahan cepat dalam preferensi dan minat pengguna media sosial. Trending topik seperti #KejayanMemanggil dapat dengan cepat meredup karena perubahan minat pengguna. Aktivisme media sosial, meskipun berhasil dalam mengumpulkan dukungan melalui tagar, perlu mempertimbangkan keberlanjutan dan kejelasan narasi untuk tetap relevan dalam jangka panjang. Keterbukaan informasi dan komunikasi di era digital membuka ruang bagi aksi kolektif dan partisipasi politik, tetapi penting untuk diingat bahwa meskipun popularitas di media sosial dapat tinggi, itu tidak selalu mencerminkan keberhasilan dalam mencapai tujuan politik yang lebih luas. Aktivisme media sosial, terlihat dalam aksi #KejayanMemanggil, mencerminkan pergeseran dalam cara masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan politik dan sosial melalui media sosial. Konsep "connective action" menjadi kunci untuk memahami perubahan ini, di mana partisipasi politik dapat terjadi tanpa komitmen yang kuat terhadap kelompok tertentu. Namun, tantangan dalam mempertahankan ketertarikan dan mencapai tujuan politik yang lebih besar tetap menjadi fokus perhatian, seiring dengan dinamika terus berkembang dalam aktivisme digital (Hasna, 2022).

5.2 Dinamika Partisipasi Publik dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi Digital dalam Gerakan #KejayanMemanggil

Gerakan Kejayan memanggil yang dilakukan pada tanggal 2019 memiliki tingkat solidaritas yang tinggi sehingga memunculkan kesadaran bahwa dibutuhkan ruang untuk mawadahi isu-isu kekerasan, Hak Asasi Manusia, agraria dan isu lainnya dalam satu aliansi. Gerakan Kejayan Memanggil ini melibatkan berbagai macam kelompok mahasiswa seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Yogyakarta, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (HMI MPO) Yogyakarta, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI DIPO) Yogyakarta, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Yogyakarta, dan Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), Serta seluruh organisasi mahasiswa Yogyakarta tergabung dalam ARB merupakan aliansi gabungan dari organisasi mahasiswa Yogyakarta. selain mahasiswa, terdapat masyarakat sipil yang ikut terlibat dalam dalam aliansi tersebut dikarenakan keresahan yang sama. organisasi-organisasi

tersebut menggerakkan massa melalui media sosial seperti Instagram dan Whatsapp. Hendri yang merupakan anggota GMNI Yogyakarta mengatakan bahwa:

“Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Yogyakarta memiliki media bulletin progresif untuk menyebarkan informasi terutama dalam berbagai gerakan untuk menggerakkan kampus”. (Hendri, wawancara, 2021).

Mereka menyebarkan informasi-informasi mengenai Gerakan Kejayan Memanggil ini melalui konsolidasi, tagar, dan poster yang penyebarannya ini dilakukan secara sukarela. Ada juga yang berkomunikasi melalui alumni dan antara senior satu organisasi. Hal ini mengakibatkan kader yang ikut turun aksi mencapai 500 orang tanpa membawa bendera HMI. Media sebagai wadah untuk membangkitkan solidaritas gerakan, mengakses informasi, memberikan pilihan kepada publik untuk memberi tanggapan, dan berinteraksi, menjadikan gerakan ini mudah untuk diketahui masyarakat sipil bukan hanya lingkup mahasiswa saja. Media sosial menjadi platform yang tepat untuk memunculkan kata-kata propaganda yang menarik berupa poster maupun caption untuk mengambil alih partisipasi masyarakat. Partisipasi menurut Ach. Wazir Ws., et al., (1999) diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang dapat berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

Gerakan Kejayan Memanggil pada tahun 2019 ini memengaruhi partisipasi serta demokrasi pada media digital. Dimana, masyarakat dapat memberikan suara serta opini pribadi mereka mengenai situasi yang tengah terjadi kala itu. Media sosial menjadi *public sphere* baru bagi masyarakat untuk memperbincangkan politik. Media sosial adalah alat komunikasi paling efektif, murah, dan masif. Dalam perkembangannya media sosial menjadi penting sebagai sarana yang efektif dalam proses komunikasi politik, terlebih mampu membunuh jarak geografis dan psikologis antara calon pemimpin dengan konstituentnya. Melalui media sosial, individu dapat membangun hubungan yang lebih aktif dan signifikan terhadap lembaga-lembaga resmi, dan pada akhirnya mereka merasa lebih dekat untuk mengekspresikan

pendapat mereka secara lebih terbuka dan bebas. Kehadiran media sosial telah mempermudah proses partisipasi politik warga negara. Cukup dengan duduk di balik layar, seorang warga negara bisa turut dalam proses kampanye, sosialisasi, penggalangan dana, protes sosial, dan partisipasi politik lainnya. Partisipasi politik menggunakan mediasosial juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan media konvensional. Namun, keduanya tidak dalam *vis a vis*, melainkan saling melengkapi, sinergis, dan integral. Mereka yang bisa menyinergikan media partisipasi konvensional dan digital (media sosial) akan menuai hasil yang optimal.

Aktivisme yang disusun oleh para aktivis melalui media sosial telah berhasil efektif dalam menyampaikan sudut pandang mereka kepada masyarakat, sehingga jumlah relawan atau pendukung meningkat. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara aktivis dan aktivisme kaum muda. Aktivis dapat diidentifikasi sebagai individu yang secara aktif terlibat dalam komunitas dengan tujuan mewujudkan perubahan berdasarkan ideologi atau nilai tertentu. Mereka memegang teguh prinsip-prinsip dalam melaksanakan aktivisme. Di sisi lain, aktivisme kaum muda, meskipun juga aktif dalam komunitas, mungkin memiliki kepentingan pragmatis yang dapat membuat peran mereka sebagai aktivis lebih rentan terhadap goncangan (Dewantara & Widhyharto, 2015).

Tantangan dalam aktivisme media digital pada #KejayanMemanggil melibatkan potensi terjadinya kesenjangan pemahaman dan semangat terkait isu yang diangkat. Dalam aktivisme media sosial, resonansi mungkin hanya terjadi pada tahap awal, dan kemudian kehilangan momentum. Ismail Fahmi, seorang analis sosial media dan digital, mencatat bahwa keberhasilan aksi #KejayanMemanggil dalam menghimpun massa yang besar sebagian besar disebabkan oleh pertemuan massa yang cepat dari aksi massa di Gejayan (Kompas.com, 2019). Meskipun demikian, hal ini juga menyoroti kelemahan aksi tersebut, yang lebih fokus pada pencapaian target politik yang melibatkan tujuh tuntutan. Walaupun aktivisme media sosial menciptakan banyak interaksi online, hasil yang dihasilkan mungkin hanya sebatas popularitas di dunia maya tanpa mencapai mobilisasi kritis yang diperlukan.

Selain itu, perbincangan dan informasi yang mendominasi media sosial

tercermin dari minat, pilihan, dan preferensi pengguna. Isu-isu yang diungkapkan oleh media arus utama cenderung melibatkan masyarakat urban kelas menengah, sehingga cakupan yang luas di media sosial dapat mencerminkan bias pada kelompok tersebut (Lim, 2013). Semua faktor ini berpotensi menjadi hambatan bagi aktivisme media sosial, mengingat tantangan kompleks yang terlibat dalam mempertahankan minat dan dukungan terhadap suatu gerakan.

5.3 Analisis gerakan #kejayanmemanggil dan tindakan pemerintah yang seharusnya diambil

#KejayanMemanggil, sebuah aksi protes kepada pemerintah. Gerakan ini menggema di media sosial, menjadi pusat perhatian masyarakat, dan membangkitkan berbagai perbincangan terkait tuntutan dan aspirasi masyarakat lainnya. Gerakan #KejayanMemanggil ini lahir sebagai respons terhadap berbagai isu yang menjadi keprihatinan masyarakat, terutama mahasiswa. Isu-isu tersebut melibatkan permasalahan politik, ekonomi, dan sosial yang dirasa belum mendapatkan tanggapan optimal dari pemerintah. Di Yogyakarta, aksi dengan tajuk #KejayanMemanggil bahkan menjadi trending di media sosial Twitter. Kemudian berbagai seruan aksi di berbagai daerah juga mengikuti tagar ini. Dalam aksi-aksi tersebut, massa yang didominasi oleh kalangan mahasiswa itu menuntut pemerintah untuk bersikap tegas atas banyaknya permasalahan yang terjadi, misalnya dalam penegakan tindak korupsi, kebakaran hutan, kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran HAM, dan sebagainya (Azanella & Sartika, 2019).

Humas aksi, Syahdan Husein, menyampaikan tuntutan yang dibawa adalah mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP, mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia, menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan

yang tidak berpihak pada pekerja, menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria dan mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor (Aida & Wedhaswary, 2019).

Dengan memanfaatkan kekuatan media sosial, gerakan ini dengan cepat mendapatkan dukungan massal, dari ranah kampus hingga menyebar ke seluruh penjuru negeri. Salah satu poin penting dalam analisis gerakan ini adalah peran media sosial sebagai alat wadah menuangkan opini dan membuka alur debat dan diskusi. Twitter, Instagram, dan platform lainnya menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk menyuarakan aspirasi mereka. Hashtag #KejayanMemanggil menjadi trending topik, membuka ruang diskusi yang luas dan mendukung terbentuknya solidaritas di antara para peserta gerakan. Meskipun gerakan ini telah menarik perhatian publik dan media, belum ada tindakan konkret dari pihak pemerintah yang diambil sebagai respons terhadap gerakan ini. Namun, gerakan ini telah memicu diskusi dan perdebatan di kalangan masyarakat dan pemerintah mengenai isu-isu yang diperjuangkan oleh gerakan ini. Dalam analisis media sosial, dapat dilihat bahwa gerakan ini bukan hanya unjuk rasa fisik, tetapi juga aspirasi dan ketidakpuasan yang merajalela di kalangan masyarakat. Postingan, video, dan tulisan-tulisan di media sosial mencerminkan beragam tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Pergeseran opini dan emosi masyarakat tercermin dalam ragam konten yang dihasilkan, dari kritik hingga ekspresi kekecewaan yang tajam. Keterlibatan generasi milenial dan Z dalam gerakan ini juga memperlihatkan perubahan paradigma dalam berpolitik. Media sosial menjadi panggung bagi mereka untuk berbicara, merangkul keragaman opini, dan membangun kesadaran bersama. Gerakan ini menciptakan ruang publik online yang memberdayakan partisipasi lebih luas.

Peran dan tindakan pemerintah menjadi sangat vital untuk memastikan stabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah perlu mendengar suara rakyat dengan serius. Dialog yang terbuka dan transparan akan membantu

menciptakan ruang untuk perundingan dan solusi yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata dalam menanggapi tuntutan yang disuarakan, baik melalui kebijakan maupun aksi nyata. Pemerintah seharusnya berupaya memahami akar permasalahan yang muncul dalam gerakan ini. Melibatkan kelompok mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan akan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan informasi atau transparansi terhadap masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan pondasi demokrasi yang sehat. Pemerintah yang transparan menciptakan kepercayaan di antara warganya. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi terkini, masyarakat dapat mengawasi kebijakan publik, mengerti alasan di balik keputusan, dan merasa lebih terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Lalu, peningkatan keterbukaan informasi juga tidak hanya mencakup pengungkapan data dan kebijakan, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam diskusi terbuka. Forum publik, konsultasi, dan partisipasi dalam proses kebijakan akan menciptakan masyarakat merasa dihargai dan memiliki peran aktif dalam perubahan yang terjadi. Selain itu, pemerintah juga mendukung literasi digital kepada masyarakat. Melihat pergerakan demokrasi politik yang terjadi di dalam era digital, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warganya memiliki kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi digital dengan bijak. Pemerintah harus mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat yang membangun, pemerintah harus memberikan fokusnya dan mengambil tindakan konkret secara langsung dalam menanggapi keresahan masyarakat. Selain itu, pelatihan literasi digital harus diperhatikan.

6. KESIMPULAN

Dalam era digital, demokrasi telah mengalami transformasi besar-besaran, di mana teknologi informasi dan media sosial memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika partisipasi publik. Demokrasi digital membawa perubahan fundamental, memperluas ruang partisipasi masyarakat dari dunia fisik ke dunia maya.

Copyright © 2024. Owned by Author(s), published by **Journal of Social Contemplativa**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

#KejayanMemanggil pada tahun 2019, mencerminkan dinamika partisipasi publik dalam demokrasi digital. Gerakan ini tidak hanya sebagai bentuk protes, tetapi juga menciptakan platform untuk berbagai macam suara. Gerakan KejayanMemanggil pada tahun 2019 menunjukkan tingkat solidaritas yang tinggi antara berbagai kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil di Yogyakarta. Gerakan ini mewadahi isu-isu penting seperti kekerasan, Hak Asasi Manusia, agraria, dan lainnya,, melibatkan organisasi mahasiswa dan masyarakat secara luas. Media sosial, menjadi platform efektif untuk menggerakkan massa dan menyebarkan informasi, menunjukkan peran pentingnya dalam membangkitkan solidaritas gerakan. Dalam konteks partisipasi politik, GerakanKejayan Memanggil memengaruhi partisipasi dan demokrasi melalui mediadigital. Media sosial menjadi wadah baru bagi masyarakat untuk berdiskusi, menyuarakan pendapat, dan berpartisipasi dalam proses politik. #KejayanMemanggil menunjukkan bahwa gerakan ini menciptakan ruang publik online yang memberdayakan partisipasi lebih luas. Namun, belum ada tindakan konkret dari pemerintah sebagai respons terhadap tuntutan gerakan ini. Pentingnya peran pemerintah dalam mendengarkan suararakyat, berdialog secara terbuka, menanggapi dan memberikan solusi. Selain itu, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, dan literasi digital menjadi kunci dalam memastikan perubahan yang positif. Pemerintah seharusnya memahami akar permasalahan, berkomitmen nyata terhadap tuntutan masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi, dan mendukung literasi digital. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah dapat merespons secara efektif terhadap keresahan masyarakat dan membangun kepercayaan publik yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. N. (2020). Interaksionisme Simbolik Perempuan Muslim dalam 'Aksi Kejayan Memanggil'. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 19(2), 151-167
- Aida, N & Wedhaswary, I. (2019). #KejayanMemanggil dan Suara dari Kejayan. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/24/131507065/gejayanmemanggil-dan-suara-dari-kejayan>. Diakses pada tanggal 12 Desember.

Copyright © 2024. Owned by Author(s), published by **Journal of Social Contemplativa**. This is an open-access article under the CC-BY-NC-SA license.

Azanella, L & Sartika, R, (2019). #GejayanMemanggil dan Aksi di Daerah Lain Bukti Pemerintah Harus Berbenah. URL:

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/23/193010565/gejayanmemanggil-dan-aksi-di-daerah-lain-bukti-pemerintah-harus-berbenah>. Diakses pada tanggal 12Desember 2023.

Bennett, W. L. (2012). The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. In

W. L. Segerberg, Information, Communication & Society. London: Routledge.

Devi, Rizky Wika Shintya. (2019). "Gejayan Memanggil dan Aksi Pergerakan

Mahasiswa di Yogyakarta." Diakses pada tanggal 30 November 2023,

- URL: <https://news.detik.com/berita/d-4717325/gejayan-memanggil-dan-aksi-pergerakan-mahasiswa-di-yogyakarta> Febrianasari, S.A., & Waluyo. (2022). Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(2), 238-246
- Fuadi, A. (2020). Social media power for protest in Indonesia: The Yogyakarta's #kejayanmemanggil case study. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 4(3), 541.
- Hasna, S. (2022). Tindakan Kolektif Masyarakat Jaringan Di Indonesia: Aktivisme Sosial Media Pada Aksi #Gejayanmemanggil. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 25-34.
- Dijk, J. V. (1999). *The network society: social aspects of new media*. London: Thousand Oaks.
- Hendryadi, H., Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: LPMP Imperium
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 102-107.
- Nofrima, S., & Qodir, Z. (2021). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Studi Gerakan Gejayan Memanggil 2019. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 185-210.
- Purboningsih, S. D. (2015). Gerakan Sosial Baru Perspektif Kritis: Relawan Politik dalam Pilpres 2014 di Surabaya. *Jurnal Review Politik*, 05(01), 100-125.
- Sari, D. K., & Siahainenia, R. R. (2015). Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik 1-34. <https://doi.org/10.22146/JSP.11020>
- Virtual pada Kasus Satinah. *Jurnal ILMUKOMUNIKASI*, 12(1), 105-118. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.446>
- Suharko, -. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1),